

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wardana. 2022. Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo Jawa Tengah. Undang: Jurnal Hukum. Volume 5 Nomor 1.
- Agung Wardana dan Dzaki Aribawa Darmawardana. 2024. Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum dan Ekonomi Politik atas Proyek Strategis Nasional. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 54 Nomor 2.
- Anggi Permatasari. 2024. Tanggung Jawab dan Perlindungan Negara atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Kewarganegaraan. Volume 8 Nomor 1.
- Arliman, L. 2017. Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 6 Nomor 3.
- Aryani, N. M., dan Hermanto, B. 2020. Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan. Jurnal Konstitusi. Volume 17 Nomor 2.
- Assegaf. 2005. *Pelanggaran Hak Ekosob Oleh Media Massa*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Bunga Natalia dan Nabila Olivia Putri. 2024. Perlindungan Hak Terhadap Rencana Penggusuran Tanah Milik Masyarakat Rempang dalam Pembangunan Eco-City di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 Nomor 2.
- Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Volume 2 Nomor 2.
- Hasyim Aidid. 2016. *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM Pada Konflik Sosial*. Makassar: Alauddin University Press.
- I Made Subawa. 2008. Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945. Kertha Patrika. Volume 33 Nomor 1.
- Irfan Lubis dkk. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat atas Hak Ulayat di Tengah Proyek Strategis Nasional. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Volume 4 Nomor 2.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- James Reinaldo Rumpia dan H.S. Tisnanta. 2018. Hukum dan Bahasa: Refleksi dan Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Lentera Hukum. Volume 5 Issue 2.
- Jamie Davidson. 2019. *Menaja Jalan: Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press.

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2024. Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia.
- Majdah El Muhtaj. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM: Megurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Maria Farida Indrawati. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maskawati. 2019. *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Litera.
- Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin. 2023. Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara. *Jurnal Sosio Logica*. Volume 3 Nomor 3.
- Muhammad Heikal Daudy. 2015. Perwujudan Kedaulatan Laut di Aceh Berbasis Hak Ekonomi, Sosial, Budaya Menurut Perspektif Hukum Laut Internasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 10 Nomor 1.
- Muhammad Irfan Aditya, Maryano, Ahmad Yani. 2023. Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional Terkait Ganti Kerugian Bagi Masyarakat Yang Terdampak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2 Nomor 6.
- Muhammad Mujab Nabil dkk. 2025. Analisis Ketidadaan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional Guna Mendorong Revisi Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Prinsip Pluralisme Hukum. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 1.
- Munte, H., Nasution, M., Tarigan, P., dan Sikumbang, J. 2017. Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota di Panwas Kota Pematangsi. *USU Law Journal*. Volume 5 Nomor 1.
- Nalom Kurniawan Barlyan. 2019. *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Nursalim dan Slamet Riyono. 2022. Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit Di Desa Wadas. *Mimbar Administrasi*. Volume 5 Nomor 1.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rafael La Porta. 2000. Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*. Volume 58 Issue 1-2.
- Ridha Wahyuni, dkk. 2025. Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Eco-City Rempang Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. Volume 5 Nomor 4.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.

- Ridwan dan Muhamad Agil Aufa Afinnas. 2025. Patologi Ruang Publik dalam Gerakan Perjuangan Hak atas Lingkungan oleh Masyarakat. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 37 Nomor 1.
- Rizky Hardianti Evendi. 2024. Rempang Eco City: Hak Asasi Manusia dan Ego Pemerintah, *UNES LAW REVIEW*. Volume 6 Nomor 4.
- Roni Septian. 2023. Masalah Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). *Prosiding Seminar Hukum Aktual*. Volume 1 Nomor 3.
- Rooza Meilia Anggraini. 2022. Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. *Jurnal El-Dusturie*. Volume 1 Nomor 1.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudirmaan Saad. *Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City*, dipresentasikan pada Diskusi Publik “Konflik Pertanahan dan Penanganan Dampak Sosial Proyek Strategis Nasional Pulau Rempang”. 23 Oktober 2023. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Syofina Dwi Putri Aritonang dan Ida Bagus Ayodya Maheswara. 2023. Tinjauan Yuridis Konflik Relokasi Warga di Pulau Rempang Berdasarkan Perspektif Teori Kewenangan Hukum. *Iblam Law Review*. Volume 3 Nomor 2.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

ARTIKEL/BERITA/LAINNYA

- Agus Sahbani, “Konflik Di Desa Wadas, ICEL: Momentum Presiden Evaluasi PSN Bermasalah”. Hukumonline.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/konflik-di-desa-wadas--icel--momentum-presiden-evaluasi-psn-bermasalah-lt62069be9d8181/?page=all>
- Ahmad Sani, “9 Petani Penolak IKN yang Ditangkap Dibotaki, Polda Kaltim: Tata Tertib”. Tempo (9 Maret 2024). <https://metro.tempo.co/read/1843044/9-petani-penolak-proyek-ikn-yang-ditangkap-dibotaki-polda-kaltim-tata-tertib>

- BP Batam, “BP Batam Paparkan Progres Relokasi Masyarakat Rempang”, <https://bpbatam.go.id/en/bp-batam-paparkan-progres-relokasi-masyarakat-rempang/>
- BP Batam. “Pengembangan Rempang Eco-City dan Berbagai Keuntungannya”. <https://bpbatam.go.id/pengembangan-rempang-eco-city-dan-berbagai-keuntungannya/> .
- BP Batam, “Temui Pengunjuk Rasa, BP Batam Tekankan PSN Rempang Untuk Kesejahteraan Masyarakat Rempang”, <https://bpbatam.go.id/temui-pengunjuk-rasa-bp-batam-tekankan-psn-rempang-untuk-kesejahteraan-masyarakat-rempang/>
- Brigitta Belia Permata Sari, “MK Nyatakan Gugatan soal Rempang Tidak Dapat Diterima”, <https://news.detik.com/berita/d-7062726/mk-nyatakan-gugatan-soal-rempang-tidak-dapat-diterima>
- CNN Indonesia, “Hundreds of Rempang residents reject relocation to make way for Eco City project”, <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2024-07-21/hundreds-of-rempang-residents-reject-relocation-make-way-eco-city-project.html>
- Gayuh Hana Waskito dan Maylafaizza Nafisha Zifa, “Perjuangan Belum Selesai, Wadas Gugat Pemerintah di Persidangan” 2024. <https://www.balairungpress.com/2024/01/perjuangan-belum-selesai-wadas-gugat-pemerintah-di-persidangan/>
- Gudang Berita, “Warga Rempang Gugat UU Cipta Kerja, Suara dari Tanah yang Hendak Dihapus”, <https://gudangberita.co.id/warga-rempang-gugat-uu-cipta-kerja-suara-dari-tanah-yang-hendak-dihapus/3/>
- Harian Kompas. “Warga Pulau Rempang Dijanjikan Pekerjaan yang Tidak Sesuai”. Edisi 12 September 2023.
- Harian Kompas. “Relokasi Warga Pulau Rempang, Apakah Solusi Tunggal”. Edisi 14 September 2023.
- Hukum Online, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.
- Hukum Online, “4 Catatan Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Wadas”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-catatan-kritis-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-wadas-lt62296c3421efb/?page=1>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Apresiasi Program Sewindu PSN, Menko Airlangga Sebut Pentingnya Keberlanjutan Infrastruktur Strategis bagi Pemerataan Pembangunan”, Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (24 November 2023) <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5510/apresiasi-program-sewindu-psn-menko-airlangga-sebut-pentingnya-keberlanjutan-infrastruktur-strategis-bagi-pemerataan-pembangunan>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Sikap Komnas HAM Terhadap Tragedi Di Pulau Rempang”. Press Release Komnas HAM

- (2023). [https://www.komnasham.go.id/files/20230908-keterangan-pers-nomor-52-hm-00\\$XBY.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230908-keterangan-pers-nomor-52-hm-00$XBY.pdf)
- Konsorsium Pembaruan Agraria, *“Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik”* Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (2023) <https://www.kpa.or.id/publikasi/dekade-krisis-agraria-warisan-nawacita-dan-masa-depan-reforma-agraria-pasca-perubahan-politik-2024/>
- Nina Susilo, *“Pemerintah Akan Tetap Pindahkan Warga Rempang”* Kompas (25 September 2023). <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/09/25/pemerintah-bersikukuh-pindahkan-warga-rempang>
- Nuswantoro, *“Warga Terus Berjuang Demi Keberlangsungan Hidup di Wadas”* 2021. <https://mongabay.co.id/2021/10/14/warga-terus-berjuang-demi-keberlangsungan-hidup-di-wadas/>
- Ombudsman RI, *“Ombudsman RI Temukan 4 Pelanggaran Proyek Rempang Eco-City,”* <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--ombudsman-ri-temukan-4-pelanggaran-proyek-rempang-eco-city>
- Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara, *“Warga Rempang datangi BP Batam sampaikan surat keberatan,”* <https://ppman.org/siaran-pers-warga-rempang-mendatangi-bp-batam-sampaikan-surat-keberatan/>
- Raden Ariyo Wicaksono, *“Tidak Ada Rempang Eco City Dalam Perencanaan Tata Ruang”* Betahita (27 September 2023). <https://betahita.id/news/detail/9288/tak-ada-rempang-eco-city-dalam-perencanaan-tata-ruang.html?v=1695769717>
- Rama Maulana, *“13 Temuan Komnas HAM dalam Konflik Wadas”*. <https://www.forestdigest.com/detail/1593/temuan-komnas-ham-konflik-wadas>
- Sri Pujiarti, *“Kasus Rempang Eco City Bergulir di MK”*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19698&menu=2>
- Supriyantho Khafid, *‘Akhirnya, 16 KK Warga Relokasi KEK Mandalika Menempati Hunian Tetap di Dusun Ngolang,’* Tempo (17 November 2023). <https://travel.tempo.co/read/1797894/akhirnya-16-kk-warga-relokasi-kek-mandalikamenempati-hunian-tetap-di-dusun-ngolang>
- Solidaritas Nasional untuk Rempang *“Keadilan Timpang Di Pulau Rempang”* Laporan Solidaritas Nasional untuk Rempang (September 2023). <https://kontras.org/2023/09/17/peluncuran-laporan-keadilan-timpang-di-pulau-rempang-temuan-awal-investigasi-atas-peristiwa-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-7-september-2023%20di-pulau-rempang/>
- Tempo, *“Wawancara Tomy Winata Soal Konflik Pulau Rempang: Ini Hanya Miskomunikasi”*. (17 September 2023). <https://majalah.tempo.co/read/wawancara/169737/tomy-winata-pulau-rempang>
- Trenasia, *“Buku Putih Valuasi Kerusakan Rempang Eco City”*, 2025, <https://trendasia.org/buku-putih-valuasi-kerusakan-rempang-eco-city/>

- Tria Noviantika. *"Hak atas Pembangunan: Refleksi dari Konflik Agraria Rempang dan Proyek Strategis Nasional(PSN)"*. <https://law.ugm.ac.id>.
- Ombudsman RI, *"Ombudsman Jateng Awasi Pihak-Pihak Terkait Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Proyek Bendungan Bener, Desa Wadas, Kabupaten Purworejo"*. <https://www.ombudsman.go.id/>